

KHILAFATUL MUSLIMIN: ANALISIS TENTANG DERADIKALISASI DIRI GERAKAN FUNDAMENTALIS INDONESIA

Khairinnas^{1*)}

¹⁾Program Studi Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta - Indonesia
Corresponding Author: teukukhairinnas@gmail.com

ABSTRACT

This research article aims to analyze the case of Khilafatul Muslimin, a conservative Islamic movement in Indonesia, as an example of religious fundamentalism and self-deradicalization. Khilafatul Muslimin has been active since 1997 and has expressed its support for Pancasila and the Unitary State of the Republic of Indonesia. The article argues that Khilafatul Muslimin is undergoing a process of self-deradicalization to prevent its members, most of whom come from Muslim families, from committing acts of violence in the name of religion. This article also examines the previous theoretical framework of religious fundamentalism and its relationship to violence and modernity in the Indonesian context. The article suggests that the government, especially the National Counterterrorism Agency (BNPT), exploit the potential of Khilafatul Muslimin. The process of self-deradicalization of Muslims is a process that aims to change the attitudes and behavior of Muslims who are involved in extreme violence or religious radicalism.

Keywords: *Khilafatul Muslimin, Islamic Fundamentalist Group, Self-Deradicalization, BNPT*

ABSTRAK

Penelitian Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus Khilafatul Muslimin, sebuah gerakan konservatif Islam di Indonesia, sebagai contoh fundamentalisme agama dan deradikalisasi diri. Khilafatul Muslimin aktif sejak tahun 1997 dan menyatakan dukungannya terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel tersebut berpendapat bahwa Khilafatul Muslimin mengalami proses deradikalisasi diri untuk mencegah anggotanya yang sebagian besar berasal dari keluarga Muslim melakukan aksi kekerasan atas nama agama. Artikel ini juga mengkaji kerangka teoritis fundamentalisme agama sebelumnya dan kaitannya dengan kekerasan dan modernitas dalam konteks Indonesia. Artikel tersebut menyarankan agar pemerintah khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memanfaatkan potensi Khilafatul Muslimin. Proses deradikalisasi diri Muslimin adalah proses yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku Muslimin yang terlibat dalam kekerasan ekstrem atau radikalisme agama.

Kata Kunci: *Khilafatul Muslimin, Kelompok Fundamental Islam, Deradikalisasi Diri, BNPT*

PENDAHULUAN

Organisasi fundamentalis yang paling sering disebut dalam wacana politik Indonesia, serta deradikalisasi diri, yang menjadi metode terkemuka dalam menyampaikan ajaran dan ajaran agama di Indonesia. Fundamentalisme agama percaya bahwa ajaran agama mereka lebih unggul dan ada perbedaan yang jelas antara yang baik dan yang jahat (Altemeyer dan Hunsberger, 2004, hal. 49). Kerangka intelektual ini mengatur semua perspektif tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia berdampingan dengan filsafat agama. Artikel ini mengupas tentang analisis teoritis Khilafatul muslimin dan Penahanan resmi Abdul Qadir Hasan Baraja oleh Polda Metro Jaya pada 7 Juni 2022, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Juni 2022. Aksi konvoi khilafah yang terjadi pada 29 Mei di Cawang Jakarta Timur, dan penyebaran gagasan melalui selebaran, majalah, dan situs web memengaruhi penahanan Baraja.

Sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998, gerakan fundamentalis memiliki lebih banyak ruang dan peluang untuk mempromosikan pemahaman mereka tentang keyakinan Islam yang sangat beragam yang didukung oleh banyak organisasi, terutama gerakan fundamentalis Islam internasional. Hal ini terutama ditunjukkan oleh para akademisi dari berbagai disiplin ilmu, terutama dari Indonesia, Timur Tengah, dan Barat. Kelompok dan organisasi fundamentalis Islam di Indonesia (Bruinessen, 2018). (MS, 2010). “Memahami konteks sejarah kebangkitan kelompok fundamentalis di Indonesia sangat penting untuk mengapresiasi aliran pemikiran kontemporer.”

Sejak Maret 2022, saat pemerintah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam), pejabat keamanan Indonesia telah berusaha untuk menangkap Khilafatul organisasi muslimin. Penahanan ini akan memperkuat Khilafatul Pendirian Muslimin sebagai organisasi massa yang berbeda terlibat dalam perlawanan tanpa kekerasan terhadap kekhalifahan. Khilafatul Muslimin memiliki perspektif khilafah yang berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, dan ormas Islam lainnya. Mereka memandang kekhalifahan sebagai sarana untuk menyatukan umat Islam dari seluruh dunia untuk menegakkan ajaran Nabi Muhammad dan menerapkan Syariat Allah. Mereka tidak berniat mendirikan negara Islam.

Khilafah organisasinya adalah struktur pemerintahan Muslim yang dirancang untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni. Khilafah menyerupai hierarki Katolik global yang berpusat di Vatikan, meskipun bukan sebuah negara. (Baraja, 2016) Abdul Qadir Hasan Baraja menyatakan, “Allah mensyaratkan persatuan, dan pemisahan dilarang keras.” Bagi

anggota Khilafatul Muslim, Khilafah merupakan perwujudan pemenuhan perintah Allah untuk mempersatukan umat Islam. Ada sekitar 8000 anggota Khilafatul organisasi Muslimin, namun tidak diketahui apakah jumlah ini akan tetap sama atau bertambah hingga organisasi ini meluas ke seluruh 34 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2003, terdapat 300.000 anggota keamanan Muslim. Namun, setelah ISIS menginvasi Indonesia pada tahun 2014, banyak anggotanya yang pindah ke JAD (Jamaah Ansharud Daulah), sehingga menyebabkan penurunan keanggotaan keselamatan Muslim.

Khilafatul Muslimin didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja pada 18 Juli 1997, namun ia tidak memiliki kantor utama hingga tahun 2000, ketika menyewa sebuah ruko kecil berlantai dua di Jl. Ikan Bawal di Teluk Betung - Bandarlampung. Setahun kemudian pindah ke Masjid Darusalam, dan Masjid Alkhilafah, yang dulunya masjid Mujahidin, menjadi kantor ketiganya setelah itu. Sepanjang kekacauan era Orde Baru, ia menemui banyak kendala. Dari tahun 1979 hingga 1984, ia ditahan karena Ia mengaku, "Saya berusaha berdakwah dengan sepenuh hati, tetapi pemerintah melarangnya, maka saya berontak" (Baraja & Abdul, 2002).

Pada tahun 1997, dia mendeklarasikan Kekhalifahan Islam, dan selama tiga tahun berikutnya, dia mendesak sesama anggota gerakan untuk menyebarluaskan pesan dan mencari seorang Khalifah. Tidak ada pemimpin atau ulama Islam yang berani menuliskan namanya sebagai khalifah, meskipun berbagai tanggapan terhadap usulan ini. Dia akhirnya dipilih oleh jemaahnya sebagai Khalifah sementara untuk menutupi kekosongan kepemimpinan yang diperlukan dan tidak dapat dihindari, dan konsep dekrit itu akhirnya dikembalikan kepadanya sebagai pencipta dan pencetusnya. Kongres Mujahidin pertama dihadiri oleh 3.000 peserta dari seluruh dunia dan diadakan di gedung Mandala Bhakti Wanitatama di Yogyakarta dari tanggal 5 hingga 8 Agustus 2000, setelah ia mengundang mereka. Ketika MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) (Khalifah) didirikan, perkumpulan ini tidak mencari sosok khalifah.

Beberapa studi tentang terorisme salah menggunakan istilah "fundamentalis". Misalnya, (Koschade, 2006) sering menyamakan "fundamentalis" dan "teroris". Akibat generalisasi ini, akan sulit membedakan antara organisasi radikal dan fundamentalis, organisasi sufi dan teroris, dan organisasi yang hanya bersifat heterodoks dan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Namun, (Kramer, 1996) menghindari pembahasan Wahhabisme dan jihadisme, mengacu pada Islamisme dan radikalisme sebagai fundamentalis (Kramer, 1996). Namun, perlu menggunakan istilah "fundamentalisme", yang

berbeda dengan "terorisme" dan "radikalisme". Taksonomi ini harus direvisi untuk membedakan fundamentalisme, terorisme, dan intoleransi.

Nichols (1925), yang memberikan penjelasan yang gamblang tentang kemunculan dan perluasan gerakan fundamentalisme. Fundamentalisme adalah cara berpikir. Selain itu, fundamentalisme agama jelas berbeda dari gerakan yang menggunakan bentuk kekerasan politik tertentu (Kumar, 2002). Fundamentalis biasanya menentang persamaan hak perempuan, gerakan pembebasan gender, dan anti-sekularisme dengan cara yang lebih moderat daripada organisasi teroris, yang terlibat dalam perlawanan kekerasan terhadap konsep sekuler anti-agama (Shaw, 2008). Untuk mengendalikan masalah keluarga seperti perceraian dan warisan, gerakan fundamentalis berusaha menggantikan hukum negara dengan norma agama fundamentalis. Pada dua titik kritis perceraian dan kematian praktik keagamaan semacam itu sering menyimpang secara signifikan dari perlindungan negara bagi tanggungan yang rentan (Wilson, 2016).

Baik gerakan anti-perempuan dalam angkatan kerja maupun gerakan fundamentalis dengan gigih menentang partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Rendahnya jumlah pekerja perempuan di Timur Tengah dan Afrika Utara umumnya dikaitkan dengan ekstremisme Islam (Bahramitash, 2003). Posisi ekonomi perempuan memburuk pada tahun 1990-an karena Krisis Asia daripada kebangkitan politik Islam, menurut bukti dari Indonesia (Bahramitash, 2003). Krisis Asia merupakan faktor penting dalam bangkitnya dukungan terhadap gerakan Islam di Indonesia. Bahkan mereka yang tidak setuju atas dasar agama mendukung fundamentalisme sebagai gerakan melawan kekerasan agama (Beeman, 2001).

Karena membela ideologi khilafah, organisasi keagamaan Indonesia Khilafatul Muslimin yang terdaftar sebagai yayasan terkadang digambarkan sebagai organisasi ekstremis atau bahkan teroris. Khilafah hanyalah sebuah konsep yang digunakan untuk mempersatukan umat Islam di bawah bendera Islam. Abdul Qadir Baraja mendirikan korporasi pada 18 Juli 1997, dan operasi bisnisnya berkantor pusat di Lampung, Indonesia. Khilafatul Muslimin menjalankan bisnis secara eksklusif di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, tampaknya pandangan dan analisis pemerintah terhadap organisasi sebagaimana tercermin dalam struktur birokrasi negara tidak berubah.

Polda Metro Jaya baru-baru ini membeberkan informasi terkait Khilafatul organisasi Muslimin, misalnya. Kelompok besar yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja ini tidak hanya menentang Pancasila, tetapi juga tampak berusaha mendirikan negara di dalam negara. Khilafatul Muslimin mendirikan sistem pemerintahan sendiri yang mirip dengan negara-

bangsa. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Khilafatul Muslimin melakukan pelanggaran terhadap pemerintah yang sah. Khilafatul Muslimin melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan korban.

Irjen Fadil menyatakan dalam jumpa pers yang digelar di Polda Metro Jaya, “Ormas ini sebenarnya telah membangun struktur pemerintahan, sistem kewarganegaraan dan struktur sosial, serta sistem pertukaran barang dan jasa, yang semuanya menunjukkan adanya negara dalam negara.” (Berita Detik, Kamis 16/6).

Karena kinerja organisasi ini sebelumnya. Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpin Khilafatul Muslimin, dulunya anggota Negara Islam Indonesia. Abdul Qadir Hasan Baraja diketahui pernah mengikuti MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) pada tahun 2000. Bahkan Abdul pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana terorisme. Dia dipenjara selama dua periode.

Pertama, dia menghabiskan tiga tahun di penjara mulai Januari 1979 karena keterlibatannya dengan Teror Warman. Karena keterlibatannya dalam pengeboman di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985, ia kemudian dipenjara selama 13 tahun. Aksi teror bom di Borobudur merupakan balas dendam atas peristiwa Tanjung Priok 1984. Atas perannya, Abdul Qadir Baraja dibui 13 tahun.

BNPT mengategorikan Khilafatul Muslimin sebagai organisasi radikal (HTI). Selain itu, rombongan ini melanggar program kesehatan setelah mengikuti jalan sehat di Kota Bandar Lampung pada Selasa, 8 Oktober 2021, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 2021 atau 1 Muharram 1443 Hijriah. Kota Bandar Lampung menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat 4 pada masa wabah Covid-19 saat itu.

Stanislaus Riyanta, seorang pengamat keamanan, intelijen, dan terorisme, mengklaim bahwa pergeseran taktik didorong oleh apa yang disebutnya sebagai "kelompok radikal", yang sebelumnya menggunakan cara-cara kekerasan dan beralih ke cara-cara non-kekerasan, seperti Khilafatul Muslimin melalui acara-acara keagamaan, penggalangan dana, bahkan konvoi, memudahkan kelompok pengajian untuk menarik simpatisan, bahkan “ke seluruh masyarakat”. Riyanta, bagaimanapun berpendapat bahwa taktik ini benar-benar menghadirkan ancaman yang "sangat serius". Karena berpotensi berdampak pada nyawa manusia, modifikasi strategi ini pada akhirnya sangat berbahaya.

Organisasi Khilafatul Muslimin mengendarai konvoi mobil roda dua melalui Cawang kawasan Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei 2022. Belakangan, peristiwa itu menjadi sangat

populer di media sosial. Fotografer menangkap prosesi Khilafatul Kelompok muslimin yang pesertanya terdiri dari orang dewasa dan anak-anak muda berbaju hijau. Beberapa dari mereka terlihat mengibarkan bendera dan membawa spanduk bertuliskan, "Selamat Datang Kebangkitan Khilafah Islam." Selain itu, operasi konvoi serupa dilakukan di provinsi Jawa Tengah, Cimahi dan Brebes serta Surabaya, Jawa Timur. Alhasil, sejumlah langkah "represif" dilakukan karena aparat negara masih meyakini bahwa kelompok ini berupaya menggulingkan ideologi Pancasila dan negara kesatuan republik Indonesia. Kemudian sejumlah pimpinan kelompok tersebut ditahan oleh aparat negara melalui Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta markas kelompok itu juga digeledah aparat di sejumlah lokasi di Indonesia.

Pada titik ini, menjadi menarik untuk menyelidiki lebih lanjut apakah organisasi yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja ini telah mengalami transformasi dalam pendekatannya untuk mencapai tujuannya atau hanya beralih dari metode kekerasan ke non-kekerasan dengan tetap mempertahankan tujuan yang sama, mengubah ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan analisis kami, organisasi muslimin ini sebanding dengan bagaimana otoritas kolonial pernah berurusan dengan kelompok nasionalis Islam. Di satu sisi, tidak diragukan lagi tidak cukup menilai struktur ini secara eksklusif dari perspektif metode ilmu politik yang menekankan otoritas-otoritas negara. Di sisi lain, ketika penekanannya ada pada kekuasaan, signifikansi yang dimainkan "budaya" dalam banyak jenis penelitian antropologis juga meresahkan.

PERSFEKTIF TEORITIK

Kajian pustaka membahas Reaksi terhadap modernitas, yang melihat munculnya kesetaraan gender, perluasan peran perempuan dalam masyarakat, penguatan demokrasi dalam sistem politik, dan kemunduran agama di ruang publik, berujung pada pembentukan Khilafatul Gerakan Muslimin, sebuah gerakan fundamentalis Islam (Mundzir, 2013). Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja memulai Khilafatul Muslimin saat masih menjadi tahanan di fasilitas Kalifigur Surabaya pada tahun 1997. Meskipun beberapa pemimpinnya telah terlibat dalam kegiatan teroris, seperti pengeboman Sekolah Alkitab Malang tahun 1985 dan candi Borobudur, serta kekerasan politik di wilayah Komand, Khilafatul Muslimin adalah gerakan fundamentalis. Hasilnya, ia mendirikan Khilafatul Muslimin, sebuah organisasi yang menolak interpretasi politik radikal, khususnya negara Islam, banyak interpretasi Baraja tentang kekhalifahan diterima sebagai kebenaran oleh para penganutnya, yang dengan gigih

mempertahankan interpretasi ini meskipun faktanya bertentangan dengan pemahaman luas tentang kekhalifahan, negara Islam, dan politik Islam. Baraja juga memandang jemaah secara berbeda dengan mayoritas umat Islam, dan mazhab Syafi'i khususnya.

Pihak berwenang sejauh ini telah menahan sejumlah Khilafatul anggota Muslimin. Penangkapan ini akan membantu mendukung penggunaan taktik non-kekerasan KM untuk mempromosikan Khilafah. Pertama, Ustadz Ghozali, Ustadz Adha Sikumbang, dan Ustadz Dasmad berada di Brebes pada hari Senin, menurut Polres Brebes. Pada Juli 2022, ketiganya segera ditahan. Kedua, pada 7 Juni 2022, Polda Metro Jaya menetapkan Khalifah kita Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka dan memenjarakannya di Lampung. Polda Jatim menetapkan Ustadz Aminuddin, Amir Wilayah Surabaya Raya, sebagai Tersangka. Amir Daerah Jawa Tengah, Ustadz Ibnu Al-Mahdi juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Klaten. Polres Brebes juga menetapkan Ustadz Ali Jamroni, amir Cirebon Raya sebagai tersangka. Pada 8 Juli 2022, ketiga amir daerah itu segera ditahan. Ketiga, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Purwakarta, Ustadz Hadi Salam, Amir Wilayah Karawang, juga langsung diamankan dalam waktu yang bersamaan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan perspektif non-Barat tentang industri terorisme dalam studi ini untuk memahami bagaimana Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpin gerakan, sangat bertanggung jawab atas transformasinya. Baraja terlibat dalam berbagai tindakan kekerasan politik dan terorisme sebelum meninggalkan semua kejahatan tersebut saat menjalani hukuman di penjara Kalifigur Surabaya. Proses deradikalisasi diri ini penting untuk dibahas karena menyoroti pentingnya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap keterlibatan Indonesia dalam terorisme.

Informasi dikumpulkan melalui observasi mendalam. Terutama setelah Juli 2022, Polda Metro Jaya resmi menahan pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, se usai ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Juni 2022. Penangkapan Baraja tak sekedar didasari aksi konvoi khilafah yang digelar di Cawang, Jakarta Timur pada 29 Mei lalu. Konvoi rombongan bermotor membawa panji khilafah di wilayah Jakarta beberapa waktu lalu yang berujung penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, sehingga mencopot papan nama dan baliho mereka, serta menutup sekolah-sekolah yang dikelola oleh Khilafatul Muslimin, banyak di antaranya adalah senior level.

Jenis analisis kebijakan ini merupakan analisis antropologi kebijakan. Selain itu, kami memperhitungkan orang-orang penting dalam penelitian antropologi politik (Vincent, 1978). Antropolog politik mengkritik bagaimana negara yang kuat seperti Republik Indonesia merasa bersaing untuk mendapatkan kedaulatan politik (Jennings, 2011). Selain itu, bisa melibatkan penelitian etnografi ilmu politik (Wedeen, 2010). Kajian ini mendapat banyak manfaat dari pendekatan antropologi politik yang dikembangkan oleh (Wydra at al, 2018), (Vincent, 1978), dan (Lewellen, 2003) untuk mempelajari komunitas kecil atau organisasi keagamaan seperti Khilafatul Muslimin .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fundamentalis

Fundamentalisme agama semakin diterima di seluruh dunia sejak tahun 1970-an. Kami menemukan perkembangan penting dalam fundamentalisme agama, yang sangat mirip dengan studi Emerson dan Hartman (Emerson, dkk, 2006). Kaum fundamentalis adalah kelompok yang terpecah juga, sebagaimana Khilafatul Gerakan Muslimin yang selama ini menginterpretasikan konsep-konsep Islam dengan cara yang berbeda telah terlihat. Pemahaman Muslimin tentang khilafah di era sekarang sangat berbeda dengan pemahaman Jamaatul Muslimin (Jamus), Jamaatul Ansharud Daulah (JAD), Darul Islam (DI), Hizbut Tahrir (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jamaah Islamiyah (JI). Hal ini menunjukkan betapa sedikit yang diketahui tentang kelompok dan organisasi keagamaan di Indonesia ((Khoirudin, 2019; Wahyudi, 2018).

Deradikalisasi Diri

Beberapa akademisi telah menulis tentang deradikalisasi diri (Setiana at al, 2019). Sejak 18 Juli 1997, Khilafatul Keinginan awal Muslimin untuk memeluk Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah dikhianati atau disangkal. Khilafatul Muslimin hingga saat ini juga melakukan deradikalisasi diri untuk mencegah jemaahnya, yang sudah menjadi warga keluarga Muslim, untuk ikut serta dalam aksi terorisme dan bentuk kekerasan lainnya (Yunanda, 2019). Jamaah wilayah Bekasi Raya Pemimpin Khilafatul Muslim Abu Salma, membantah tudingan bahwa kelompoknya berniat melakukan makar. Konvoi yang menjadi bagian rutin dari program kelompoknya sejak 2018 dan dilakukan setiap empat bulan itu diketahui polisi, ujarnya. Siapa yang memberi saran awal untuk operasi konvoi ini tidak diketahui.

Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja adalah anggota inti yang sangat kuat dari Khilafatul ini organisasi Muslimin, dan tampaknya tidak ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa kasus Teror Warman melibatkan tindakan teror yang sebanding dengan yang dilakukannya di masa lalu (1976). Kelompok Islam ini melakukan sejumlah aksi teror di Indonesia antara tahun 1976 hingga 1981 pada saat pemerintahan Orde Baru berkuasa. Itu adalah salah satu kegiatan fundamentalis yang dilakukan oleh beberapa pengikut DI/TII Kartosoewirjo.

Dalam persidangan Haji Ismail Pranoto yang dianggap sebagai tokoh gerakan ini menunjukkan bahwa inilah tujuan utama gerakan Jihad Komando. Menurut putusan hakim yang dikeluarkan dalam persidangan, di Borobudur pada 21 Januari 1985 terjadi ledakan bom yang menggunakan bahan peledak Trinitron Toluene (TNT) jenis PE 808 produksi Dahana, produsen bahan peledak milik negara. Tiga batang TNT, satu detonator buatan RRC, dan dua baterai nasional 1,5 volt membuat setiap bahan peledak (Ihsan 2016). Kabel yang dikepang dengan hati-hati dan konsisten digunakan. Pelaku pengeboman candi Borobudur ditemukan tiga bulan kemudian. Pada tanggal 16 Maret 1985, di Kampung Curah Puser, Sumber Desa Kencono, Banyuwangi, Jawa Timur, terjadi ledakan di bus Pemudi Express jurusan Malang-Bali. Ledakan tersebut merenggut nyawa tujuh orang yang menaiki bus tersebut. Tiga korban adalah pelaku bom: Abdul Hakim, Hamzah alias Supriyon, dan Imam alias Gozali Hasan.

Sebelum terjadi ledakan, salah satu penumpang Abdulkadir Ali al Habsy turun dari mobil. Dia ditahan oleh polisi. Husen Ali al Habsyi dan Mohammad Jawad alias Ibrahim alias Kresna adalah dua pelaku pengeboman di Borobudur yang terungkap dari pengakuan Abdulkadir. Abdulkadir mengklaim, pada 24 Desember 1984, kelompoknya juga mengebom Seminari Alkitab Asia Tenggara dan Sasana Katolik. Gereja Budaya di Malang, selain candi Borobudur. Pelaku yang ditahan antara lain Mohammad Jawad, Husein Ali al Habsy, Abdulkadir Ali al Habsy, Achmad Muladawillah, Murjoko, dan Mochamad Achwan . 37 tahun setelah kejadian di Borobudur, nama Komando Jihad kini kembali muncul setelah petugas Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menahan Abdul Qadir Hasan Baraja pimpinan Khilafatul Muslimin di Lampung, Selasa, 7 Juni 2022.

Baraja dipenjara terkait kemunculan konvoi khilafah di sejumlah daerah. Asep Warman alias Musa adalah dalang dari beberapa aksi teror yang dilakukan Baraja di Komando Jihad DI, disebut juga dengan peristiwa "Teror Warman" yang terjadi di Malang tahun 1979. Kelompok ini melakukan "fa'i" konsep pencurian yang mulia atau perbuatan

yang bermotivasi agama atau perampokan dengan cara mencuri mobil yang berisi gaji karyawan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Baraja juga pernah dipenjara pada tahun 1979. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Parmanto MA, seorang dosen dan Sebelas Rektor Universitas Maret (UNS). Karena keterlibatannya dalam kasus Teror Warman Baraja mendapat hukuman 13 tahun penjara. Setelah itu, Baraja dipenjarakan lagi selama 13 tahun sehubungan dengan bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal 1980-an.

Diskusi

Khilafah adalah negara atau kekuasaan secara umum. Khilafah juga berperan sebagai pemimpin umat Islam di dunia dan membela kepentingan mereka dari segala ancaman. Khilafah bukanlah bentuk diktator atau teokrasi, melainkan sebuah model demokrasi konsultatif yang menghormati hak-hak dasar manusia dan mengakui perbedaan pendapat dan keberagaman. Dan tampaknya dalam arti luas, kegiatan melalui konvoi berbahaya dan tidak efektif untuk merekrut pendukung dan menyebarkan ilmu Khilafah.

Kelompok yang dipimpin Abdul Qadir Hasan Baraja itu seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah karena sikap toleran mereka terhadap konsep khilafah. Untuk dapat mengembangkan metode epistemologis bagaimana falsafah Pancasila dapat memperluas proses penerimaannya di berbagai kalangan masyarakat yang memiliki metode dan kerangka konseptual agama dalam menerima negara Pancasila, maka pemerintah harus memanfaatkan proses deradikalisasi mandiri yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin. Mereka kekurangan cara lain untuk berkomunikasi dengan komunitas mereka mengenai profil negara, yang dianggap cukup mengkhawatirkan oleh banyak orang. Sebenarnya, ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk mensosialisasikan Pancasila secara lebih kuat keseluruh lapisan masyarakat.

Struktur organisasinya mencerminkan hal ini dalam praktiknya. Wilayah Ustadz Amir Daulah Sumatera Supriono Hadi terbentang dari Lampung hingga Aceh. Setelah itu, Merak ke Madura ditangani oleh Amir Daulah Jawa Ustdadz Hamzah Sat. Lalu Ustadz Zulkifli Rahman, Amir Daulah Indonesia Timur dari NTB sampai Sorong - Papua. Ustadz Amiruddin Dewa adalah Amir Daerah Borneo yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi. Untuk menjadi mekanisme atau wadah untuk mempersatukan umat Islam, maka Khilafatul Muslimin didirikan. Mereka memiliki wilayahnya sendiri, tidak menuntut perebutan kekuasaan, dan dituntut menegakkan syariah yang ideal.

KESIMPULAN

Sebagai kelompok fundamentalis Khilafatul Muslimin menganut satu ajaran yang dianggap sebagai dasar atau sumber dari semua agama Islam. Khilafah yang dianggap sebagai inti ajaran Islam. Khilafatul Muslim berusaha mempelajari dan memahami topik menjadi tema atau penekanan utama dari semua upaya dakwah Khilafatul Muslimin. Mereka menyebarkan ceramah-ceramah Khilafah ke semua jamaahnya dan melakukan segala upaya untuk mempertahankan keyakinan para penganutnya, menyebabkan mereka menjadi fanatik yang hanya berpegang teguh pada interpretasi sepihak kelompok ini terhadap Khilafah.

Mereka memiliki paham khilafah yang sangat berbeda dengan ormas Islam lainnya yang memiliki ideologi serupa, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Ansharu Daulah (JAD), dan Darul Islam atau NII (Negara Islam Indonesia). Perbedaan ini berasal dari interpretasi yang mendasari kata "khilafah". Khilafah bukanlah sebuah negara di mata Khilafatul Muslimin adalah melainkan pertemuan yang menunjuk seorang imam untuk melakukan setiap ritual, seperti shalat, dan bukan merupakan cara untuk menaklukkan negara lain (melainkan sebagai sarana untuk menghubungkan semua orang dalam kebersamaan dan saling melindungi). Sebenarnya, ini adalah salah tafsir dari niat awal khilafah.

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikan agama dalam Pancasila. Pemerintah harus memilih apakah akan memanfaatkan ini untuk mempromosikan Pancasila sebagai gagasan bangsa, yang akan meningkatkan dukungan dari umat Islam Indonesia.

secara strategis memanfaatkan jejaring sosial mereka, terutama hubungan interpersonal mereka dengan kerabat, teman, dan majikan mereka di Hong Kong, untuk menjelaskan dari narasi mereka tentang masalah kesehatan dan perilaku pencarian kesehatan. Mereka menggunakan jejaring sosial mereka untuk memperoleh dan berbagi informasi kesehatan, mencari sumber daya di luar institusi resmi untuk melengkapi penyediaan layanan kesehatan, dan bersatu untuk membahas kebijakan kesehatan nasional baik dari negara asal maupun negara tuan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Altemeyer, Bob, dan B. H. (n.d.). *"Skala fundamentalisme agama yang direvisi: Pendek dan manis ."* *Jurnal Internasional Psikologi Agama* 14 (1) (2004): 47-54.
- Bahramitash, R. (2003). *"Fundamentalisme Islam dan Peran Ekonomi Perempuan: Kasus Iran."* *Jurnal Internasional Politik, Budaya dan Masyarakat* 16 (4): 551-568.
- Baraja, Abdul Qadir Hasan, wawancara oleh A. (2002). *Wawancara dengan Ustadz Abdul*

- Qodir Hasan Baraja (20 September).*
- Baraja, A. Q. H. (n.d.). *Memilih Jamaah Yang Benar . Bangil (Jatim) : UD Abda'u Jaya Bangil .*
- Beeman, W. (n.d.). "Melawan Perjuangan yang Baik: Fundamentalisme dan Kebangkitan Agama." *Antropologi untuk Dunia Nyata.*
- Bruinessen, M. van. (2018). *Muslim Indonesia dalam Dunia yang Mengglobal: Respon Westernisasi, Arabisasi, dan Pribumi.*
- Emerson, Michael O., dan D. H. (2006). "Kebangkitan Fundamentalisme Agama." *Tinjauan Sosiologi* 32 (1): 127-144.
- Jennings, R. C. (2011). "Kedaulatan dan modernitas politik: Silsilah kritik kedaulatan Agamben." *Teori Antropologi* 11 (1): 23-61.
- Koschade, S. A. (2006). "Jihad yang Berkembang: Konsistensi Ideologis Doktrin Jihadi dari Al-Qaeda ke Gerakan Fundamentalis Revolusioner." *Pusat Penelitian Perubahan Sosial; QUT.*
- Kramer, M. (n.d.). "Fundamentalis Islam pada Umumnya: Dorongan untuk Kekuasaan." 1996. *Kwartalan Timur Tengah . Diakses 30 Juli 2022, <http://meforum.org/304/fundamentalis-islam-at-large-the-drive-for-power>.*
- Kumar, K. (n.d.). "Fundamentalisme Agama di India dan Seterusnya." *Parameter* 32 (3): 17.
- Lewellen, T. C. (2003). *Antropologi Politik : Sebuah Pengantar. ABC-CLIO.*
- MS, I. (2010). *Pengaruh Pemikiran Ulama Timur Tengah Terhadap Gerakan Fundamentalisme Islam Di Yogyakarta Dan Surakarta .*
- Mundzir, I. (2013). " Sikap Muslim Terhadap Modernitas : Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung." *Afkaruna : Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Indonesia* 9 (1): 65-82.
- Setiana , Bagus Gani, dan S. K. K. (2019). *Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Polisi (Studi Kasus Di Polres Semarang).*
- Shaw, S. M. (2008). "Pengajuan yang Ramah: Fundamentalis dan Wanita Baptis Selatan." *Formasi Feminis* 20 (1): 51-77.
- Vincent, J. (n.d.). "Antropologi Politik: Strategi Manipulatif." *Tinjauan Tahunan Antropologi* 7.1 (Januari 1978): 175-194. Diakses 3 Agustus 2022. <http://annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.an.07.100178.001135>.
- Wahyudi, J. (2018). " Menelaah Sikap Keagamaan Khilafatul Muslimin di Sumbawa Barat." *Dalam Praktikum Pengelolaan Keanekaragaman di Indonesia , 87.*
- Wedeen, L. (2010). "Refleksi Karya Etnografi dalam Ilmu Politik." *Kajian Tahunan Ilmu Politik* 13 (1): 255-272.
- Wilson, R. F. . (n.d.). "Privatisasi Hukum Keluarga Atas Nama Agama." *Jurnal William dan Mary Bill of Rights* 18.4 (2016): 925.
- Wydra , Harald, dan B. T. (2018). *Buku Saku Antropologi Politik . Edward Elgar Publishing.*
- Yunanda, R. R. (2019). RADIKALISME DALAM PERFECTIF ISLAM DAYAH DI ACEH. *JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA (JISA).* <https://doi.org/10.30829/jisa.v2i2.6383>